

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kecamatan Perhentian Raja

4.1.1. Keadaan Geografis Kecamatan Perhentian Raja

Kecamatan Perhentian Raja adalah suatu wilayah yang terletak di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Kecamatan perhentian raja merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kampar dengan pusat pemerintahan berada di Desa Pantai Raja. Kecamatan Perhentian Raja terdiri dari 5 Desa yaitu Desa Pantai Raja, Desa Hang Tuah, Desa Kampung Pinang, Desa Sialang Kubang, dan Desa lubuk sakit . Kecamatan Perhentian Raja merupakan kecamatan pemekeran dari Kecamatan Siak Hulu yang dibentuk melalui peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 22 Tahun 2003.

Dilihat dari bentangan wilayah, Kecamatan Perhentian Raja Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Siak Hulu dan Tambang, Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Kampar Siak Hulu, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri Hilir, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri Hilir dan tambang.

Kecamatan Perhentian Raja luas wilayahnya menurut pengukuran kantor camat adalah $\pm 159.67 \text{ Km}^2$ atau 15.967 Ha. Kecamatan Perhentian Raja merupakan dataran rendah , perbukitan serta daerah yang dialiri oleh sungai kampar. Keadaan geografis alam Kecamatan Perhentian Raja sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan, sehingga yang menjadi komoditi utama adalah sawit, karet, padi sawah, perikanan, hasil hutan, dan hasil galian.

4.1.2. Penduduk

Berdasarkan hasil sensus penduduk 2012 kecamatan perhentian raja mempunyai penduduk sebanyak 15.288 orang terdiri dari 7.869 jiwa laki-laki, dan 7.414 jiwa perempuan dari 4.258 Kepala Keluarga (KK) dengan kepadatan penduduk rata-rata 1.439 jiwa/Km². untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel VI.1 : Jumlah Penduduk Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Berdasarkan Desa/Kelurahan

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Presentase (%)
1	Pantai Raja	3.970	25.97
2	Kampung Pinang	2.569	16.80
3	Hang Tuah	3.413	22.32
4	Sialang Kubang	2.749	17.98
5	Lubuk Sakat	2.587	16.93
Jumlah		15.288	100

Sumber Data: Monografi Kecamatan Perhentian Raja Tahun 2012

Dari tabel di atas terlihat bahwa keadaan penduduk Kecamatan Pongkar berdasarkan kelurahan yaitu kelurahan Pantai Raja jumlah penduduk sebanyak 3.970 orang dengan persentasenya 25.97%, Kelurahan Kampung Pinang jumlah penduduk sebanyak 2.569 orang dengan persentasenya 16.80%, Kelurahan Hang Tuah jumlah penduduk sebanyak 3.413 orang dengan persentasenya 22.32%, Kelurahan Sialang Kubang jumlah penduduk sebanyak 2.749 orang dengan persentasenya 17,98%, dan Kelurahan Lubuk Sakat jumlah penduduk sebanyak 2.587 orang dengan persentasenya 16,93%.

4.1.3. Kehidupan Beragama

Agama mempunyai peranan penting di dalam kehidupan manusia, karena kehidupan manusia di alam raya ini ibarat sebuah lalu lintas, dimana masing-masing ingin berjalan dengan selamat dan sekaligus ingin cepat sampai ketempat tujuan. Untuk itu manusia memerlukan peraturan dan Undang-Undang yaitu agama yang dapat dijadikan petunjuk dan tuntutan di dalam kehidupan manusia. Berikut dapat dilihat kehidupan beragama di Kecamatan Perhentian Raja, yaitu:

Tabel IV.2: Penduduk Kecamatan Perhentian Raja Berdasarkan Agama yang Dianut

No	Agama	Frekuensi	Persentase (%)
1	Islam	14.361	94.68
2	Kristen	638	4.21
3	Khatolik	169	1.12
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
Jumlah		15.168	100

Sumber Data: Monografi Kecamatan Perhentian Raja Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Perhentian Raja beragama Islam dimana jumlah pemeluknya sebanyak 14.361 orang dengan persentasenya 94.68%, kemudian yang beragama Kristen sebanyak 638 orang dengan persentasenya 4.21%, dan yang beragama Khatolik sebanyak 169 orang dengan persentasenya 1.12%. dilihat dari jumlah penduduk Kecamatan Perhentian Raja secara keseluruhan ada juga yang tidak memiliki keyakinan. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Perhentian Raja beragama Islam.

4.1.4. Pendidikan

Penduduk Kecamatan Perhentian Raja pada umumnya sudah mengerti akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka sehingga anak-anak yang berada dalam usia sekolah rata-rata sudah mengecap pendidikan di sekolah negeri maupun swasta. Mengenai pendidikan diketahui mayoritas masyarakat Kecamatan Perhentian Raja hanya berada pada tamatan SD dan SLTP. Namun secara keseluruhan tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Perhentian Raja secara umum sudah baik. Sudah banyak yang menamatkan SLTA dan sudah banyak juga yang menamatkan pendidikan di perguruan tinggi yang kedepannya dapat diberdayakan untuk memajukan desa.

4.1.5. Mata Pencaharian

Kecamatan Perhentian Raja merupakan dataran rendah , perbukitan serta daerah yang dialiri oleh sungai kampar. Keadaan geografis alam Kecamatan Perhentian Raja sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan, sehingga yang menjadi komoditi utama adalah sawit, karet, padi sawah, perikanan, hasil hutan, dan hasil galian. Adapun mata pencaharian penduduk Kecamatan Perhentian Raja dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel IV.3 : Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Perhentian Raja

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase(%)
1	Petani	1.200	33.63
2	Pedagang	105	2.94
3	Peternak	37	1.04
4	Pengrajin Industri	9	0.25
5	PNS	107	3.00
6	Buruh	943	26.43
7	Pengusaha	71	1.99
8	Lain-lain	1.096	30.72
Jumlah		3.568	100

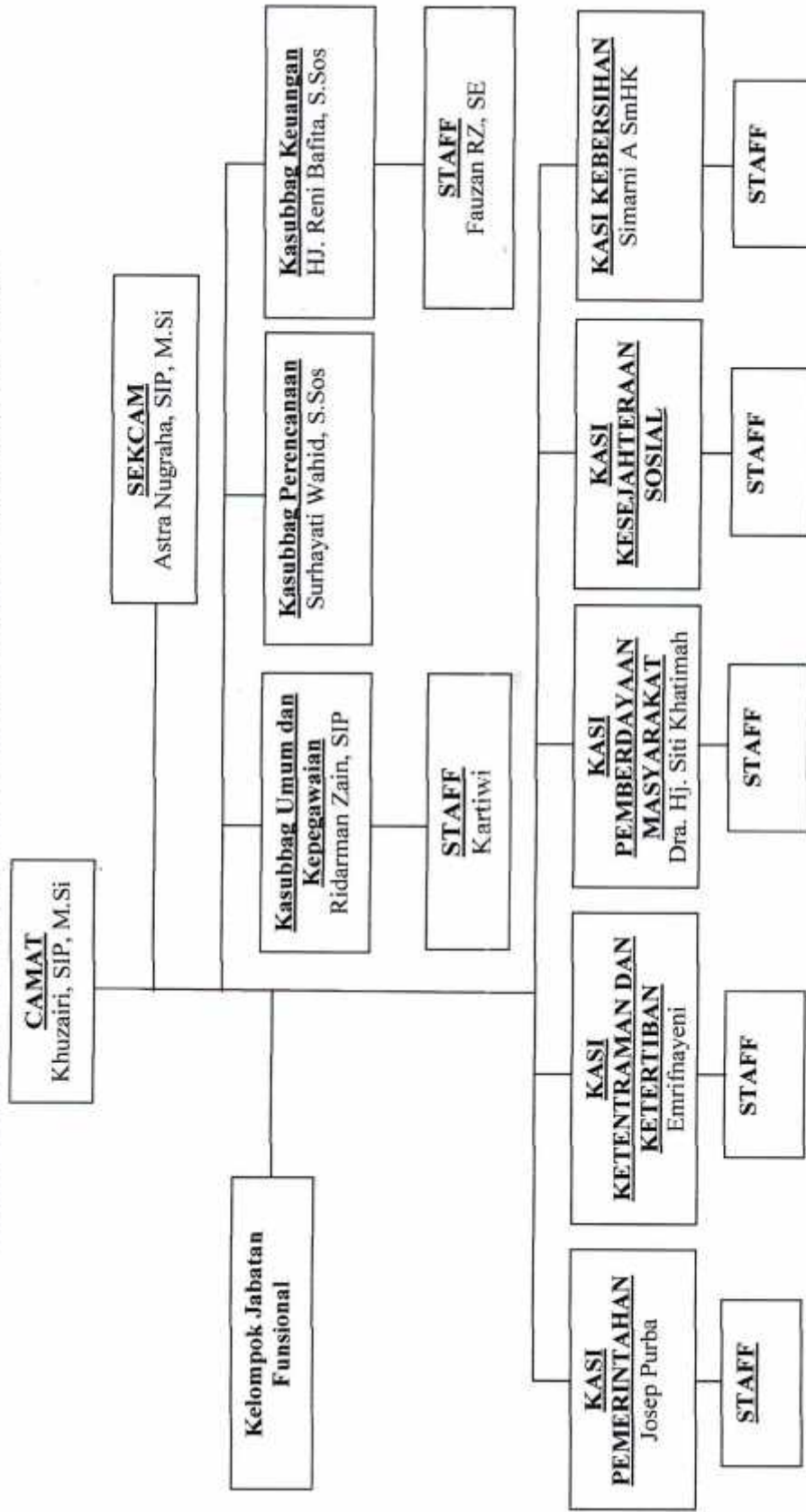
Sumber Data: Monografi Kecamatan Perhentian Raja Tahun 2012

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar dari penduduk Kecamatan Perhentian Raja bermata pencaharian sebagai petani yaitu sebanyak 1.200 orang atau 3.63%, sebagi buruh lepas sebanyak 943 orang atau 26,43%, sebagai PNS sebanyak 107 orang atau , sebagai Pedagang sebanyak 105 orang atau , sebagai pengusaha sebanyak 71 orang atau, sebagai peternak 37 orang atau, sebagai pengarajin industri sebanyak 9 orang, dan sebagian penduduk yang lain bekerja sebagai karyawan, dokter, dosen, dan juga pekerjaan yang lainnya. Jadi dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Kecamatan Perhantian Raja bekerja sebagai petani.

4.1.6. Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Perhentian Raja

Dalam pembahasan ini penulis tidak mencantumkan tugas dan fungsi kepala desa, penulis hanya membuat bagan struktur pemerintahan yang ada di Kantor Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Adapun bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Perhentian Raja sebagai berikut :

Gambar IV.1
Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar



Sumber : Data dari Kantor Camat Di Kecamatan Perhentian Raja Tahun 2012

4.2. Gambaran Umum PKBL PT. Perkebunan Nusantara V

PKBL pada dasarnya adalah wujud kepedulian perusahaan terhadap kondisi masyarakat sekitar, khususnya untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan koperasi dari laba disisihkan. Melalui PKBL, perusahaan merasa terpanggil untuk turut memberdayakan masyarakat sekitar dengan mendorong kegiatan produktif dan perluasan kesempatan berusaha sehingga dapat diperoleh kemajuan bersama. PKBL memungkinkan hubungan antara perusahaan dan masyarakat menjadi lebih harmonis.

PKBL mulai beroperasi di Kecamatan Perhentian Raja ini, sejak tahun 1996 sampai sekarang. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilaksanakan PT.Perkebunan Nusantara V adalah program untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengembangan/perbaikan kondisi sosial masyarakat sebagai wujud kepedulian BUMN di sekitar wilayah kerja, khususnya untuk daerah sekitar kebun yang terletak di Kabupaten/Kota Propinsi Riau.

4.2.1. Program Kemitraan

Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri, dalam rangka meningkatkan sosial ekonomi masyarakat. Program Kemitraan ini memberikan pinjaman modal kerja kepada masyarakat dengan jumlah bunga yang relatif kecil yaitu 6%.

Program Kemitraan PT. Perkebunan Nusantara V tidak hanya memberikan pinjaman kemitraan untuk modal kerja dan investasi dengan suku bunga, persyaratan dan jaminan pinjaman yang ringan. Tetapi perusahaan juga memberikan bantuan pembinaan dalam bentuk penyuluhan, pelatihan, pemasaran

yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Mitra Binaan menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi usaha mikro dan kecil (UMK) yang dijalankan masyarakat, sehingga menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Melalui program ini maka setiap UMK yang telah berkembang diharapkan juga bisa menyerap tenaga kerja dari masyarakat lokal, sehingga mereka mendapatkan penghasilan. Dengan demikian masyarakat sekitar yang tidak bisa bekerja di lingkungan perusahaan, tetap bisa merasakan manfaat dari kehadiran Perusahaan.

Adapun dana program Kemitraan diberikan dalam bentuk :

- a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan
- b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan
- c. Beban pembinaan yaitu untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan, beban bersifat hibah, dan beban hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan mitra binaan. (Peraturan Menteri BUMN Pasal 11)

Tata cara pemberian pinjaman dana Program Kemitraan sebagai berikut :

- a. Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya untuk diajukan

kepada BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur, dengan memuat sekurang-kurangnya data sebagai berikut:

1. Nama dan Alamat Unit Usaha
 2. Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha
 3. Bukti identitas diri pemilik/pengurus
 4. Bidang Usaha
 5. Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang
 6. Perkembangan kinerja usaha
 7. Rencana Usaha dan Kebutuhan Dana
- b. BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon Mitra Binaan
- c. Calon Mitra Binaan yang layak Bina menyelesaikan proses administrasi pinjaman dengan BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur Bersangkutan
- d. Pemberian pinjaman kepada calon Mitra Binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak yang sekurang-kurangnya memuat :
1. Nama dan alamat BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan
 2. Hak dan kewajiban BUMN Pembina dan BUMN Penyalur tau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan
 3. Jumlah Pinjaman dan peruntukannya

4. Syarat-syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadual angsura pokok dan juga administrasi pinjaman)

- e. BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dilarang memberikan pinjaman kepada calon mitra binaan yang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga penyalur lain.

Adapun besarnya jasa administrasi pinjaman dan dana program Kemitraan per tahun sebesar 6% dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh menteri. Apabila pinjaman diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi marjin yang dihasilkan disetarakan dengan marjin sebesar 6% atau sesuai dengan penetapan Menteri sebagaimana dimaksud. Apabila pinjaman diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN Pembina adalah mulai dari 10% (10:90) sampai dengan maksimal 50% (50:50) (Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007).

4.2.2. Program Bina Lingkungan

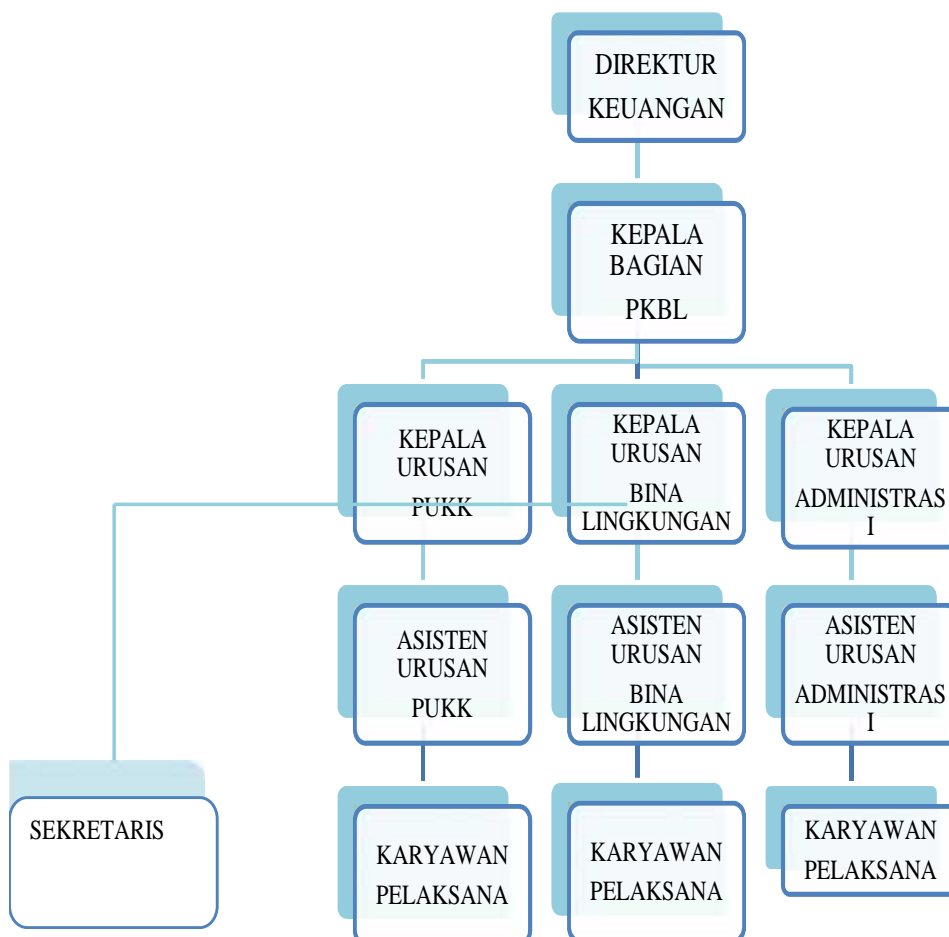
Bina Lingkungan merupakan salah satu wujud kepedulian perusahaan terhadap komunitas lokal yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang, khususnya yang berada di sekitar unit usaha. Meskipun jumlah tidak terlalu besar, namun manfaat langsung yang dirasakan masyarakat dapat menjadi pengikat rasa persaudaraan dan kebersamaan yang selama ini menjadi tolok ukur keberhasilan. Sebagian dana dialokasikan untuk bantuan bagi para korban bencana alam, pembangunan infrastruktur fisik (jalan, jembatan, rumah ibadah), peningkatan sarana kesehatan, pendidikan dan latihan.

4.2.3. Struktur Organisasi Unit Kerja Bagian PKBL

Pembentukan bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di PTP Nusantara V adalah berdasarkan surat keputusan Direksi No. : 136-SKEP/05.D1/05.09/VIII/2004 tanggal 1 Agustus 2004 tentang pembentukan bagian PUKK dan Bina Lingkungan dan penyempurnaan Bagian Kemitraan dan Pengembangan Kebun PTP Nusantara V. Dalam struktur korporasi PTP Nusantara V bahwa bagan PKBL berada dibawah Direktur Keuangan dan dipimpin seorang Kepala Bagian dan dibantu 2 orang Kepala Urusan, 3 orang Asisten Urusan, dan 12 orang Karyawan Pelaksana.

Gambar IV.2

Bagan Struktur Organisasi PKBL dapat dilihat sebagai berikut :



Sumber : Data dari Kantor PT.PN V bagian PKBL Tahun 2012

4.2.5. Uraian Tugas Bagian/Unit Kerja

Adapun uraian tugas di bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yaitu :

a. Urusan Bina Lingkungan :

Uraian Tugas

1. Mendata penyaluran dana BL per daerah dan sektor tiap bulannya.
2. Administrasi penyaluran BL.
3. Membantu mempersiapkan dan melaksanakan survey BL serta administrasi laporan.
4. Turut membantu penyerahan bantuan BL.
5. Membantu mempersiapkan laporan akhir tahun BL.
6. Dll

b. Urusan Program Kemitraan

Uraian Tugas

1. Survey dan analisis
2. Input data seluruh Kab/Kota
3. Penagihan ke Kabupaten/Kota
4. Membuat berita acara serah terima agunan
5. Membuat rekap agunan tiap penyaluran
6. Dll.

c. Urusan administrasi PKBL

Uraian Tugas :

1. Mencatat transaksi buku bank
2. Melaporkan kondisi keuangan PKBL
3. Membuat dan menyusun RKA PKBL.
4. Mempersiapkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan PKBL
5. Mempersiapkan surat/tanggapan dan laporan terhadap pihak III tentang PKBL
6. Mempersiapkan dan melaksanakan survey PKBL serta Adm laporannya
7. Dll

d. Sekretaris

Uraian tugas :

1. Sekretaris kepala bagian
2. Mengarsip surat masuk dan keluar.
3. Dll